

Pengaruh Kebijakan Pendidikan Dalam Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Cindy Fitria¹, Wiene Surya Putra²

STAI Syekh H.Abdul Halim Hasan Al- Ishlahiyah ^{1,2}, Binjai, Indonesia

Email: *Fitriacindy106@gmail.Com*

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol: 1, Nomor: 2, Desember 2023 Halaman : 741-744	<i>Character education is a person's main capital for success. This is also being promoted by the government through the Strengthening Character Education (PPK) program by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbudristek). Character education must be taught, made into a habit consistently so that it can have a good impact on every student. Meanwhile, teachers and educational institutions are figures who play a big role in this process. Even so, currently there are still many who do not clearly understand what is meant by character education. Therefore, educational policy also greatly influences character education because educational policy itself has meaning and meaning. Educational policy consists of principles and policy decisions that influence the field of education, as well as a collection of laws and regulations that regulate the implementation of the education system. Educational governance can be divided between local, state, and federal governments at various levels. Therefore, educational policy also has a big influence on character education.</i>
Keywords: <i>character education education policy</i>	

Abstrak

Pendidikan karakter merupakan modal utama seseorang untuk sukses. Hal ini juga tengah digalakkan oleh pemerintah melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pendidikan karakter harus diajarkan, dijadikan kebiasaan secara konsisten sehingga bisa membawa dampak yang baik pada setiap peserta didik. Adapun, guru dan lembaga pendidikan merupakan sosok yang berperan besar dalam proses tersebut. Meski begitu, saat ini masih banyak yang belum secara pasti mengerti dengan apa yang dimaksud sebagai pendidikan karakter. Maka dari itu kebijakan pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter karena kebijakan pendidikan sendiri mempunyai makna dan arti. Kebijakan pendidikan terdiri dari asas-asas dan keputusan-keputusan kebijakan yang mempengaruhi bidang pendidikan, serta kumpulan undang-undang dan aturan yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan. Tata kelola pendidikan dapat dibagi antara pemerintah lokal, negara bagian, dan federal di berbagai tingkat. Dengan itu kebijakan pendidikan juga sangat berpengaruh pada pendidikan karakter.

Kata Kunci : pendidikan karakter, kebijakan pendidikan

PENDAHULUAN

Secara umum, masa remaja merupakan periode yang sulit untuk ditempuh, sehingga remaja sering dikatakan sebagai kelompok umur bermasalah (the trouble teens). Siswa pada masa remaja cenderung memandang kehidupan secara tidak realistis. Ia melihat dirinya, orang lain, serta fenomena lainnya, sebagaimana yang ia inginkan, bukan sebagaimana adanya. Adanya anggapan bahwa dirinya bukan lagi anak-anak, menyebabkan mereka berusaha meninggalkan perilaku dan sikap kekanak-kanakannya untuk diganti dengan sikap dan perilaku yang lebih dewasa.

Kedewasaan dalam konteks disini adalah kedewasaan menurut ukuran mereka, yang ternyata masih samar-samar. Mereka merasa mendapatkan kebebasan dalam melakukan suatu hal seperti halnya orang dewasa. Namun apa yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan beberapa tingkah laku yang melanggar aturan atau norma yang berlaku, segala macam tindakan siswa yang melanggar aturan seperti tawuran, mabuk-mabukan, berjudi, membolos, balapan liar dan memalak, hal itu semua bisa digolongkan sebagai kenakalan remaja.

Menurut Hamalik (dalam Kusumawati dkk, 2012: 6) masa remaja merupakan suatu masa, dimana individu berjuang untuk tumbuh menjadi "sesuatu", menggali serta memahami arti dan makna dari segala sesuatu yang ada. secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi

dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.

Proses pendidikan karakter perlu dilakukan sejak dini dan sudah harus dimaksimalkan pada usia sekolah dasar. Potensi yang baik sebenarnya sudah dimiliki manusia sejak lahir, tetapi potensi tersebut harus terus dibina dan dikembangkan melalui sosialisasi baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di era globalisasi ini manusia dengan mudahnya menggunakan teknologi yang ada bukan hanya orang dewasa namun juga anak-anak. Teknologi saat ini digunakan dalam dunia pendidikan karena sangat membantu proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, teknologi juga mampu digunakan sebagai alat komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Namun, bagaimanapun juga teknologi mempunyai dampak positif maupun negatif dalam ranah pendidikan. Banyaknya kasus cyberbullying, tawuran antar pelajar, kekerasan bahan pelecehan seksual pada anak merupakan lemahnya karakter bangsa. Karakter bangsa yang baik harus dibentuk dan dididik sedini mungkin agar masyarakat mampu menanamkan

sifat-sifat dan perilaku yang baik sejak dini sehingga dapat menekan angka kriminal pada kasus-kasus di atas. Secara history, apabila memerhatikan hakikat kontennya di dalam dunia pendidikan karakter sangat lah penting di terapkan pada diri siswa siswi yang ada di sekolah. Usia pendidikan karakter sesungguhnya seumur dengan sejarah pendidikan itu sendiri, hanya saja menyangkut istilah yang dipakai pada pendidikan karakter baru muncul pada dekadeterakhir di Amerika Serikat, termasuk yang di pakai di Indonesia dalam dua tahun terakhir.

seperti yang di nyatakan oleh Suyata (2011:13), dalam 10-20 tahun yang lalu istilah pendidikan moral lebih populer di Amerika, sedangkan istilah pendidikan karakter lebih populer di kawasan asia. Sementara itu, di Inggris orang lebih menyukai istilah pendidikan nilai. Secara khusus di Indonesia telah dipakai pula istilah pendidikan budi pekerti dan pendidikan moral Pancasila. Sepanjang sejarahnya, di seluruh dunia ini, pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar (smart), dan membantu mereka menjadi manusia yang baik (good). Menjadikan manusia cerdas dan pintar, boleh jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi orang yang baik dan bijak, tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Dengan demikian, sangat wajar apabila dikatakan bahwa problem moral merupakan persoalan akut atau penyakit kronis yang mengiringi kehidupan manusia kapan dan di mana pun.

Karakter siswa sangat penting dalam kegiatan pembelajaran karena karakter siswa merupakan segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar sehingga karakter tersebut sangat mempengaruhi keefektifan dalam proses pembelajaran, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan berbasis karakter siswa disekolah/ madrasah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan studi dokumen/teks. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, metode ini dipilih karena lebih mudah menghadapi kenyataan, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan informan, disertai metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh Bersama terhadap nilai-nilai yang dihadapi. Serta metode ini bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Ciri khusus dari penelitian pustaka adalah peneliti menggunakan berbagai literatur yang diperoleh melalui buku dan artikel-artikel penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan online, jurnal-jurnal online dan artikel-artikel ilmiah secara online. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Mendes, dkk (2020) menyatakan bahwa proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75).

Abidin (2006:17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.

(Dunn,1999) Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan.

Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro. Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara.

Carter V Good (1959) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan public maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Ketika kebijakan politik dalam dan luar negeri, kebijakan pendidikan biasanya akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Bahkan pergantian menteri dapat pula mengganti kebijakan yang telah mapan pada jamannya.

KESIMPULAN

Suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik dibidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab pemerintah sudah seharusnya membuat perubahan-perubahan didalam pendidikan demi tercapainya pelaksanaan pendidikan yang lebih baik.

Hal ini merupakan suatu kebijakan yang sangat baik, mengingat banyaknya guru yang berlomba-lomba kedaerah perkotaan mengakibatkan kurangnya guru di daerah pedesaan/terpencil. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah khususnya yang mana mampu membuat suatu program-program baru untuk perubahan pendidikan yang lebih berkualitas.

Pendidikan karakter merupakan suatu upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum,

tata krama, budaya, dan adat istiadat yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action).

REFERENCES

- Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(05), 1-10
- Aulia Alfirzan, dkk. 2021. *Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Padang: Jurnal Pendidikan Tambusai
- Dunn, William N. 2019. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.
- Hasbullah, 2019. *Kebijakan Pendidikan dalam perspektif teori, Aplikasi dan Kondisi obyektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter*, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2021)
- Imron, Ali. 2020. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khusuma, Dharma, Cipi Triatna, Johar Permana, *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 2021.
- Megawangi, Ratna. 2019. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Indonesia Heritage Fondation
- Muin, Fachtul. 2019. *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Arr-ruzz Media.
- Mudjia Rahardjo. 2012. *Kebijakan dalam Pendidikan*. (Bandung: Misan Pustaka).
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Raharjo, S. B. (2022). *Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(3).
- Riant, N. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, 2000—2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- tiawan, F, dkk. (2021). *Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam*. *Al-Muddris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 4(1).
- Wibowo, Agus, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah: Konsep dan Praktik Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020